



Sisi REDD+ Yang Hijau Rimbun: Pelajaran bagi REDD+ dari Negara-negara yang Kawasan Hutannya Bertambah Luas – Laporan Ringkas Kebijakan

JULI | 2011

Hans Gregersen, Hosny El-Lakany, Luke Bailey, dan Andy White



Pemerintah berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional kian menyadari pentingnya hutan bagi dunia. Permasalahan-permasalahan mendesak seperti hilangnya keanekaragaman hayati, perebutan sumberdaya alam, pengurangan kemiskinan, dan emisi karbon semuanya bertemu di kawasan hutan. Upaya-upaya internasional untuk mengatasi tantangan ini memusatkan perhatian pada negara-negara yang hutan tropisnya berkurang dengan cepat. Pemberitaan seputar perundingan REDD+ pada Konferensi Para Pihak ke-16 (COP-16) yang diselenggarakan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja mengenai Perubahan Iklim PBB/UNFCCC) di Cancun merupakan contoh utama, dan tahun 2011, Tahun Hutan Sedunia, pasti akan menarik lebih banyak perhatian pada kegentingan situasi yang saling berkaitan ini.

Meskipun terdapat ramalan yang mengerikan mengenai hutan di banyak negara, menurut Penilaian Sumberdaya Hutan Dunia atau Global Forest Resource Assessment (GFRA) 2010 dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO, 2010), ada 78 negara dengan luasan hutan lebih dari 200.000 hektar mempertahankan atau menambah luasan hutannya selama 1990-2010 (Tabel 1). Kelompok ini mencakup lebih dari separuh (52%) kawasan hutan di dunia. Dari kelompok ini, lima puluh sembilan negara di antaranya bertambah luas hutannya, termasuk 85% (73 juta hektar) penambahan luas

hutan tanaman selama jangka waktu yang sama. Dari 78 negara, 62% merupakan negara berkembang atau yang sedang tumbuh sedangkan 8% digolongkan sebagai Negara Miskin Pengutang Besar menurut Dana Moneter Internasional (IMF, 2011). Namun, ciri serupa yang diperlihatkan oleh hampir semua negara tersebut ialah bahwa mereka pernah tergolong sebagai negara yang berkurang luas hutan mereka (FLC).¹ Negara-negara kaya maupun miskin telah melindungi dan merehabilitasi hutan jauh hari sebelum pelaksanaan REDD. Mengapa dan bagaimana mereka mengalami perubahan hingga menjadi Negara-negara yang bertambah luas hutannya (Forest Adding Countries atau FACs)?

Ini bukan semata-mata urusan historis: upaya mencari jawaban yang umum atas pertanyaan ini di berbagai negara menyingkap pelajaran-pelajaran yang bermanfaat bagi FLCs pada waktu ini. Secara khusus, pengalaman FACs dapat memberitahukan rancangan dan pelaksanaan program-program REDD+ yang bertujuan untuk memandu lebih banyak lagi negara berhutan luas di dunia menjadi FACs.

Guna menjawab pertanyaan ini, kajian-kajian dilakukan dengan menggunakan pustaka yang luas perihal transisi hutan (dari kehilangan menjadi penambahan), dan melakukan studi-studi kasus terinci terhadap lima negara FAC utama yang telah beralih dari situasi sebelumnya sebagai FLC dalam berbagai rentang waktu dalam kurun sekitar lima puluh tahun belakangan, yaitu Cina, India,

MITRA RRI



1. Kami katakan "hampir semua" karena beberapa negara seperti Bhutan, Guyana, dan Suriname tidak pernah benar-benar merasakan tekanan penduduk dan pasar terhadap hutan untuk dapat menggolongkan mereka secara tepat sebagai FLC; setidaknya-tidaknya bukan pada zaman modern dan bukan dengan langkah-langkah penting seperti halnya kebanyakan negara maju dan negara-negara tempat studi kasus yang dibahas di bawah ini.

TABEL 1: PERTAMBAHAN LUAS HUTAN TERBESAR SELAMA 1990-2010, MENURUT NEGARA

Negara (studi kasus dengan huruf miring)	Luas hutan				Laju perubahan tiap tahun						Pertam- bahan 1990-2010
	1990	2000	2005	2010	1990-2000		2000-2005		2005-2010		
	juta ha	juta ha	juta ha	juta ha	juta ha/ thn	%/thn	juta ha/ thn	%/thn	juta ha/ thn	%/thn	juta ha
<i>Cina</i>	157.14	177	193.04	206.86	1.99	1.2	3.21	1.75	2.76	1.39	49.72
Uni Eropa (27 negara)	141.95	149.26	151.65	153.92	0.73	0.5	0.48	0.32	0.45	0.3	11.97
Amerika Serikat	296.34	300.2	302.11	304.02	0.39	0.13	0.38	0.13	0.38	0.13	7.68
India	63.94	65.39	67.71	68.43	0.15	0.22	0.46	0.7	0.15	0.21	4.49
<i>Vietnam</i>	9.36	11.73	13.08	13.8	0.24	2.28	0.27	2.21	0.14	1.08	4.44
Turki	9.68	10.15	10.74	11.33	0.05	0.47	0.12	1.14	0.12	1.08	1.65
Filipina	6.57	7.12	7.39	7.67	0.06	0.8	0.06	0.76	0.06	0.73	1.1
<i>Chili</i>	15.26	15.83	16.04	16.23	0.06	0.37	0.04	0.26	0.04	0.23	0.97
Norwegia	9.13	9.3	9.68	10.07	0.02	0.19	0.08	0.81	0.08	0.78	0.94
Belarusia	7.78	8.27	8.44	8.63	0.05	0.62	0.03	0.39	0.04	0.46	0.85
Dunia	4,168	4,085	4,061	4,033	-8.32	-0.2	-4.84	-0.12	-5.58	-0.14	-135.34

Sumber: Penilaian Sumberdaya Hutan Dunia (GFRA) FAO 2010. Untuk melihat tabel yang lengkap, lihat Lampiran 1 pada laporan utama.

Catatan: Korea Selatan merupakan negara yang berkurang hutannya selama kurun waktu ini (walaupun hanya sedikit, yaitu 148.000 ha). Upaya besar mereka untuk merehabilitasi hutan dilaksanakan pada tahun 1970-an dan 1980-an, dan hingga waktu ini telah menghasilkan luas hutan lebih dari 0,6 juta hektar dan penambahan delapan kali lipat dalam hal laju persediaan kayu tiap tahun (hingga 80 m³/ha). Lagi pula, deforestasi yang dilakukan baru-baru ini merupakan akibat dari keputusan kebijakan penggunaan lahan dan bukan lemahnya tata kelola bidang kehutanan (Gregersen 1982, KFS 2010).

Vietnam, Korea Selatan, dan Chili. Sebagian dari mereka baru mulai melakukan perubahan hutan dua puluh tahun silam. Dalam studi-studi kasus tersebut, kami mendapati sejumlah faktor serupa yang muncul dari studi-studi kasus di kelima negara yang dikaji. Menggunakan sudut pandang global, kami menelaah temuan dari studi kasus tersebut dan pengaruhnya terhadap REDD+. Di bawah ini disajikan ringkasan temuan, pelajaran, dan kesimpulan. Adapun rincian dan bahan pendukung disajikan pada laporan utama.²

Faktor-Faktor yang mempengaruhi transisi hutan di negara-negara tempat dilakukannya studi kasus

Di sini, kami merangkum perubahan-perubahan pokok yang berkaitan dengan perubahan hutan di lima negara berhutan utama yang dikaji. Tabel 2 memperlihatkan perubahan di kawasan hutan di masing-masing kelima negara tersebut selama kurun waktu 1990-2010. Mengenai setiap negara, Lampiran 1-5 pada laporan lengkap menyajikan data mengenai perubahan tutupan hutan selama seluruh rentang masa peralihan (yaitu sebelum 1990).

Perubahan-perubahan pokok yang berkaitan dengan perubahan hutan:

1. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cukup cepat terjadi ketika transisi hutan

2. Laporan ringkas kebijakan ini didasarkan pada makalah terinci dan kumpulan studi kasus: Gregersen, Hans, Hosny El-Lakany, Luke Bailey, dan Andy White. 2011. *Greener Side REDD+: Lessons for REDD+ from Countries where Forests Area is Increasing* (Sisi Lebih Hijau dari REDD+: Pelajaran bagi REDD+ dari Negara-negara yang Kawasan Hutannya Bertambah Luas. Washington, D.C.: Rights and Resources Initiative.

berlangsung, tetapi tidak lantas berarti negara-negara tersebut “sejahtera” dalam hal pendapatan per kapitanya. Bahkan Korea Selatan yang pada waktu ini menjadi negara industri memiliki Produk Domestik Bruto per kapita hanya sebesar US\$ 403 ketika mulai menangani persoalan ini pada tahun 1973, walaupun angka tersebut kemudian berlipat lima kali selama dasawarsa berikutnya (Bank Dunia. 2010. Indikator Pembangunan Dunia).

2. Masalah-masalah besar dalam lingkungan hutan dan/atau sangat kurangnya kayu mengakibatkan perubahan sikap para pejabat tinggi pemerintahan berkenaan dengan nilai hutan di dalam negeri, dan permasalahan yang timbul akibat deforestasi dan degradasi hutan. Bertambah menjadi-jadinya erosi tanah dan krisis penyediaan kayu bakar di Korea Selatan mendesak pemerintah untuk melakukan Proyek Rehabilitasi Hutan pada tahun 1973 yang menekankan pada peningkatan kepemimpinan dan tanggung jawab pengelolaan pada tingkat desa.
3. Perubahan sikap ini pada gilirannya menyebabkan perubahan besar dalam kebijakan yang berpengaruh terhadap hutan. Perubahan-perubahan tersebut menghasilkan dukungan yang lebih besar terhadap pelestarian hutan, larangan pembalakan di hutan alam, meluasnya hutan tanaman industri dan rehabilitasi hutan, dan liberalisasi perdagangan. Perubahan tersebut terjadi berkali-kali selama proses peralihan dari FLC menjadi FAC. Sebagai contoh, deforestasi besar-besaran di Vietnam, kebanyakan didorong oleh permintaan ekspor perabotan kayu, menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung perluasan hutan tanaman dan impor kayu bulat yang lebih banyak. Permasalahan yang susul menyusul dalam hal investasi hutan tanaman

industri, berpadu pula dengan keberhasilan pembaruan di bidang pertanian, menyebabkan pemerintah mengubah lagi pusat perhatiannya, yaitu meninggalkan subsidi untuk hutan tanaman dan menuju pada pengakuan yang lebih kuat atas kepemilikan rumah tangga dan kepemilikan komunal.

Pergeseran kebijakan ini selanjutnya menyebabkan:

1. *Penguatan peran dan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat hutan*, termasuk melalui pembaruan mendasar dalam hak tenurial hutan. Dalam segala hal, masyarakat setempat beserta kepentingan dan insentif mereka untuk menanam pohon dan merehabilitasi hutan, menjadi pelaku utama dalam program-program dan kebijakan-kebijakan baru. Banyak di antara perubahan ini sedang berjalan atau masih tetap sepenuhnya dilaksanakan, misalnya undang-undang tentang hutan masyarakat pribumi di India. Pada tahun 2006, India mengesahkan Undang-Undang tentang Hak atas Kawasan Hutan setelah banyaknya perdebatan sengit yang menuntut negara-negara bagian mengalihkan hak tenurial hutan dan wewenang untuk menetapkan keputusan kepada desa dan perorangan yang dalam kenyataannya telah dan sedang menggunakan dan mengelola lahan tersebut.
2. *Gerakan untuk membuka jalan ke pasar hasil hutan dunia dan liberalisasi kebijakan impor kayu*, yang diikuti dengan pertumbuhan impor kayu yang pesat untuk menyingkirkan tekanan terhadap hutan di dalam negeri, dan untuk memenuhi kebutuhan akan kayu yang meningkat pesat (termasuk untuk ekspor). Pembaruan ekonomi dan proses “membuka pintu terhadap dunia luar” dilakukan di Cina pada tahun 1978, yang membuka pintu

TABEL 2. PERUBAHAN LUAS HUTAN SELAMA 1990-2010 DI LIMA NEGARA TEMPAT STUDI KASUS

Negara	Jumlah luas hutan (juta ha)				Luas hutan tanaman industri (juta ha)				Perubahan, 1990-2010		
	1990	2000	2005	2010	1990	2000	2005	2010	Total (Mha)	Planted (Mha)	Planted (% of total gain)
Chili	15.26	15.83	16.04	16.23	1.71	1.94	2.06	2.38	0.97	0.68	70%
Cina	157.1	177	193	206.9	41.95	54.39	67.22	77.16	49.72	35.21	71%
India	63.94	65.39	67.71	68.43	5.72	7.17	9.49	10.21	4.49	4.50	100%
Korea Selatan	6.48	6.41	6.37	6.33	-	1.74	1.78	1.82	-0.15	0.09	-
Vietnam	9.36	11.73	13.08	13.8	0.97	2.05	2.79	3.51	4.44	2.55	57%
Jumlah (5 negara)	252.2	276.4	296.2	311.7	50.34	67.29	83.34	95.09	59.47	44.75	75%

Sumber: Penilaian Sumberdaya Hutan Dunia (GFRA) FAO 2010. Mencakup hutan alam maupun hutan tanaman industri (HTI); tidak mencakup "lahan berhutan lainnya".

Catatan: Korea Selatan masih termasuk walaupun luas hutannya menunjukkan sedikit berkurang selama 1990-2010 sedangkan masa puncak perubahan hutan pada akhir 1960-an dan awal 1970-an.

perdagangan produk-produk kayu dan meningkatkan arti pentingnya menciptakan penyediaan kayu nasional yang berkelanjutan. Pada tahun 1988, inventarisasi sumberdaya hutan nasional yang ketiga kalinya mengungkapkan bahwa tutupan hutan telah bertambah hingga 13 persen dari luas lahan di negara tersebut. Dengan mengungkapkan bahwa Cina memiliki lebih kurang 125 juta hektar kawasan hutan, dipastikan bahwa telah ada perubahan hutan.³

3. *Penetapan program-program besar secara gencar untuk aforestasi, reforestasi, dan restorasi lahan rusak (aforestation, reforestation, and restoration of degraded land atau ARRDL).*⁴ Kegiatan-kegiatan ARRDL merupakan bagian utama strategi kehutanan Chili. Undang-Undang tentang Hutan Asli

tahun 2007 mengharuskan rehabilitasi sedikit-dikitnya 30.000 ha lahan rusak setiap tahun pada masa mendatang.

Dengan menelaah hasil studi kasus dan kepustakaan mengenai perubahan hutan, kami memperoleh pelajaran yang kemungkinan besar bermanfaat bagi negara-negara yang belum kunjung mengalami perubahan hutan; dan kami juga memperoleh pelajaran mengenai rancangan dan pelaksanaan REDD+. Mengapa menurut kami pelajaran-pelajaran tersebut dapat bermanfaat bagi negara-negara yang pada waktu ini tergolong sebagai FLC dan bagi proses REDD+? Dalam banyak hal, FLC menyerupai FAC pada masa lalu, yaitu: 1) negara-negara dengan luas hutan yang berkurang yang menghadapi tekanan penduduk dan pasar terhadap hutan mereka; 2) didorong oleh keinginan akan pertumbuhan sosial ekonomi; 3) terkadang

3. Perubahan di masing-masing kawasan sebenarnya berlangsung pada waktu yang berbeda-beda. Dengan demikian, "dari angka-angka tersebut, dapat disimpulkan secara umum sebagai berikut: perubahan dari luas hutan yang berkurang menjadi bertambah di Barat Laut Cina berlangsung selama akhir 1970-an; di Utara dan Selatan-Tenggara, perubahan terjadi selama awal 1980-an; di Timur Laut dan Barat Daya, perubahan berlangsung pada akhir 1980-an dan awal 1990-an" (Zhang, 2000).

4. Kami menggunakan singkatan ARRDL dalam makalah ini demi memudahkan dan membuat perbedaan yang jelas antara REDD dan REDD+. Tanda '+' pada REDD+ belum ditetapkan ataupun disepakati penggunaannya dalam perbincangan internasional di luar hal berikut ini: "peran pelestarian, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pemecuan cadangan karbon hutan di negara-negara berkembang" (UNFCCC, 2010).

didesakkan oleh pimpinan negara yang berwibawa kepada rakyatnya, dan terkadang melalui desakan dari bawah, dari rakyat dan pimpinan daerah mereka yang berupaya memperoleh taraf hidup yang lebih baik dan pembagian hak atas manfaat dan mata pencarian yang lebih adil yang dapat diperoleh dari hutan dan lahan pada umumnya.

Dengan alasan-alasan tersebut, banyak negara menjadi FLC karena menganggap hutan yang ada menghambat kemajuan. Dengan demikian, hutan dibuka untuk memuluskan jalan bagi proyek pertanian, perkotaan, dan prasarana. Di lain pihak, hutan memberikan pendapatan dan modal untuk pertumbuhan. Dalam banyak hal, taraf tata kelola sedemikian rupa sehingga pembalakan liar dan korupsi tersebar luas dan memberi andil besar dalam proses deforestasi.

Dengan memahami mengapa dan bagaimana negara-negara yang pada waktu ini tergolong sebagai FAC mulai mengatasi berbagai persoalan ini dapat memberi gagasan yang bermanfaat bagi negara-negara yang pada waktu ini tergolong sebagai FLC dan bagi proses REDD+, yang tentunya bertujuan bukan sekadar menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, melainkan juga untuk memperluas hutan produktif dan memperbaiki pengelolaan hutan yang ada.

Pelajaran yang dapat diambil

Kami memperoleh tiga macam pelajaran yang berharga untuk disebutkan; walaupun lebih banyak lagi “gagasan” yang muncul dari masing-masing studi kasus dan pengalaman FAC lain, ataupun kelompok FAC, yang berharga untuk dipertimbangkan karena FLC gagal mengikuti cara pembangunan yang ramah lingkungan. Pelajaran yang dibahas dalam makalah utama ialah:

1. Perhatian dan dukungan yang sungguh-sungguh terhadap pembaruan tenurial hutan

oleh pucuk pemerintahan itu mutlak. Apabila para pemimpin penting pemerintahan tidak peduli dengan hutan, atau apabila mereka memandang hutan sebagai penghalang bagi pembangunan, atau bahkan yang lebih parah, sebagai sumber kekayaan pribadi, maka peralihan dari FLC menjadi FAC itu sulit (kemungkinan terbagus) atau mustahil (kemungkinan terburuk).

2. Pembaruan tata kelola hutan harus menjadi bagian dari proses menuju perubahan hutan. Pada khususnya, hal ini meliputi:
 - pasal-pasal dalam perundang-undangan yang tegas, jelas, dan adil dan penetapan kebijakan dan rencana yang berpihak pada hutan yang mencakup keterlibatan penduduk setempat dalam tata kelola hutan. Larangan pembalakan dan semakin baiknya pengendalian pembalakan di hutan alam merupakan cara penting sebagaimana halnya dengan penetapan kawasan lindung yang tepat.
 - pembaruan tenurial hutan diperlukan untuk memberi insentif bagi tersebarluasnya perbaikan pengelolaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman pohon. Pembaruan tenurial hutan juga dapat ikut mengendalikan pembalakan liar apabila disertai dengan penguatan penegakan hukum.⁵
 - penguatan pemantauan oleh pemerintah dan masyarakat maupun penegakan undang-undang kehutanan.
3. Program-program utama ARRDL menjadi tulang punggung bagi perluasan kawasan hutan dan perbaikan dalam menumbuhkan persediaan kayu. Tetapi, program-program ini perlu direncanakan secara saksama sehingga saling melengkapi dan bukannya bersaing

5. Dengan cara tersebut, pembaruan juga mutlak bagi REDD, khususnya berkenaan dengan bagi-hasil dan ikut mengendalikan pembalakan liar.

dengan tujuan pelestarian dan pengelolaan hutan alam.

Berkaitan dengan pelajaran bagi FLC ini, ada pula pelajaran penting bagi masyarakat dunia yang sedang dalam proses perancangan kerangka REDD+. Kesesuaian dan pentingnya pelajaran tersebut bergantung pada pengakuan bahwa: (a) dalam hal “ekonomi hijau”, pemakaian kayu itu bagus sebagai pengganti bahan baku karena merupakan bahan baku alternatif tidak terbarukan dan menghasilkan energi besar; dan (b) kebutuhan akan kayu berkembang pesat di kebanyakan negara yang sedang membangun (juga tentunya di lima negara tempat studi kasus), baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri maupun permintaan pasar ekspor yang tumbuh pesat. Dengan pengakuan tersebut, pelajaran bagi masyarakat dunia dinyatakan dalam kesimpulan Kelompok Kerja Informal mengenai Pembiayaan Sementara REDD (IWG-IFR, 2009): “Sarana insentif (untuk REDD)... harus dekat dengan liputan dunia - sarana insentif yang menarik bagi sebuah negara, tetapi tidak bagi negara-negara lainnya, boleh jadi menyebabkan kebocoran internasional.”⁶

Pelajaran yang diperoleh dari kenyataan tersebut ialah bahwa tatkala dengan REDD, negara-negara berhasil melestarikan sumberdaya hutan alam dan menghindari deforestasi di negeri sendiri, mereka akan cenderung memperbesar impor kayu dan hasil hutan dari negara-negara lain dalam jumlah besar, kecuali jika telah memiliki sumber kayu yang siap panen dari hutan tanaman industri (yang tidak berlaku bagi empat dari lima negara yang dikaji di sini).⁷ Bertambahnya impor berarti bertambahnya panen kayu di negara-negara

lain, yang mengakibatkan kebocoran internasional. Dengan demikian, cadangan emisi karbon lebih rendah dan REDD kurang berhasil dibandingkan dengan yang tampak dengan hanya melihat FAC yang dipertanyakan. Lagi pula, setidaknya-tidaknya di negara-negara tempat studi kasus, banyak dari kebocoran tersebut berasal dari pembalakan liar, yang tidak menguntungkan bagi negara-negara eksportir dan turut mempertahankan harga kayu dan produk kayu di pasar internasional lebih rendah daripada yang seharusnya.

Kesimpulan Utama Kajian

Studi ini menghasilkan sejumlah kesimpulan yang berkaitan dengan kebijakan berdasarkan telaah pustaka maupun mengapa dan bagaimana lima negara tempat studi kasus berubah dari negara yang berkurang luas lahan mereka (akibat deforestasi) menjadi bertambah sumberdaya hutan nasional mereka. Empat kesimpulan utama tersebut ialah sebagai berikut:

1. Investasi dan program-program ARRDL untuk memperbesar industri hutan dan efisiensi konversi kayu bakar merupakan pelengkap yang diperlukan bagi keberhasilan REDD. Bukanlah kebetulan apabila lebih kurang 85 persen luas hutan tanaman industri yang bertambah di dunia selama 1990-2010 berada di negara-negara yang berubah dari FLC menjadi FAC. Kegiatan-kegiatan ARRDL dapat ikut mengurangi kebocoran internasional dalam jangka waktu menengah hingga agak panjang. Cara lain untuk mencoba mengurangi konsumsi kayu kemungkinan besar tidak

6. “Kebocoran” internasional terjadi ketika suatu negara mengurangi deforestasi dan degradasi hutannya, yang biasanya mengurangi penyediaan kayunya dibandingkan dengan kebutuhannya, yang menyebabkan kenaikan pesat impor kayu, yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan degradasi di negara-negara lain.

7. Chili telah memulai program hutan tanaman industri jauh hari sebelum sungguh-sungguh melestarikan hutan alamnya. Dengan demikian, ketika pelestarian hutan dilakukan, Chili telah memiliki sumber kayu dari hutan tanaman industrinya yang siap panen untuk dipakai pada industri kayu di dalam negeri dan untuk tujuan ekspor. Adapun Selandia Baru memberi contoh lain lagi.

berhasil ataupun tidak diharapkan dalam kerangka ekonomi hijau. Kami sepenuhnya menyadari bahwa ada sanggahan-sanggahan yang diajukan mengenai mengapa hutan tanaman industri tidak semestinya dianjurkan dalam kerangka luas REDD+. Dalam makalah lengkap, kami telah mengakui adanya sanggahan-sanggahan ini dan memberikan saran-saran mengenai bagaimana menangani permasalahan yang dapat menimbulkan kecaman.

2. Manfaat-bersama yang penting dari perluasan program ARRDL secara gencar dapat memberikan sumbangsih untuk memenuhi Sasaran Pembangunan Milenium No. 1, yaitu pengurangan kemiskinan. Sumbangsih ini akan lebih besar apabila prakarsa ARRDL dilengkapi dengan pembaruan tenurial hutan dan program-program yang tepat untuk: (a) menguatkan dan memperluas pengembangan usaha kecil dan menengah hutan kemasyarakatan; (b) menyediakan kredit bagi usaha-usaha tersebut dengan biaya yang wajar; dan (c) mempermudah diperolehnya teknologi dan pasar.
3. Dalam memenuhi potensi tersebut dalam butir (2) di atas, berkenaan dengan besarnya dan pembagian manfaat yang akan dihasilkan, secara langsung bergantung pada sebaik apa negara-negara tanggap terhadap perbaikan tata kelola dan sarana tenurial hutan mereka maupun penghargaan atas hak penghuni hutan dan pinggir hutan. Kesimpulan ini berhubungan dengan keberhasilan REDD+ juga.
4. ARRDL dapat menjadi sarana untuk “membatasi spekulasi kita” dengan REDD,

yang mungkin memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan dengan yang terpikir pada waktu ini untuk dijalankan dalam skala cukup besar agar menghasilkan perbedaan nyata pada tingkat dunia. Sebagaimana telah kita perhatikan pada studi kasus yang disajikan, negara-negara yang telah berhasil melakukan perubahan hutan mungkin telah melakukannya sebagian dengan alasan telah “mengekspor deforestasinya” sehingga meniadakan sebagian keuntungan dari REDD yang mereka tuntut. Kayu yang diperoleh dari hutan tanaman industri pada waktu ini memenuhi lebih dari seperempat kebutuhan kayu bulat dunia untuk industri. Potensinya jauh lebih besar. Apabila hutan tanaman industri dikelola secara berkelanjutan, maka kebocoran internasional akan berkurang.

Masyarakat dunia memiliki alasan masing-masing untuk maju dengan kecepatan penuh dalam merancang dan menjalankan program REDD+ dunia (yang berhasil mengatasi penyebab deforestasi maupun tantangan yang terkait dengan kebocoran dan tambahan dari luar, pembiayaan, dan pembagian manfaat dari REDD, dan sebagainya). Pada waktu yang bersamaan, masyarakat dunia perlu memperbesar bantuan bagi program-program negara dalam merehabilitasi hutan, lahan pertanian dan lainnya yang rusak dan telantar, bagi program-program yang secara gencar memperluas kegiatan ARRDL-nya, sebagaimana terjadi di negara-negara tempat studi kasus.⁸ Apakah kegiatan ARRDL secara kelembagaan dan administratif tergolong “+” dalam REDD+ itu merupakan keputusan politik internasional. Yang terpenting ialah bahwa kegiatan-kegiatan ini mendapat perhatian yang selayaknya; bukan sekadar berhenti pada terbentuknya lembaga.

8. Global Partnership for Forest Landscape Restoration/Kemitraan Dunia untuk Rehabilitasi Kawasan Hutan (GPFLR, 2009) memperkirakan bahwa terdapat lebih dari satu miliar hektar lahan semacam itu di dunia pada waktu ini.

Kegiatan-kegiatan ARRDL merupakan pelengkap yang dibutuhkan oleh REDD dan dimaksudkan untuk sasaran akhir yang sama, yang perlu mencakup perlindungan keanekaragaman hayati dan perbaikan mata pencarian bagi masyarakat hutan dan pinggir hutan maupun masyarakat adat yang miskin. REDD dan ARRDL saling melengkapi dalam hal dibutuhkannya landasan tata kelola demi keberhasilan, yaitu pembaruan tenurial hutan dan pelimpahan hak otonom yang terjamin untuk memakai lahan hutan negara, pengendalian pembalakan liar dan korupsi, dan kesiapan cara kerja kelembagaan untuk

memastikan bagi-hasil yang adil, pertanggungjawaban pemerintah, dan suara rakyat dalam menetapkan arah pembangunan pada masa mendatang. Dalam kerangka pembaruan tata kelola ini, perlu dimantapkan upaya pengawalan yang tepat untuk memastikan agar tidak terjadi pertentangan antara REDD dan hutan tanaman industri dalam kerangka REDD+, dan terwujudnya peluang sebesar-besarnya untuk saling melengkapi antara REDD, ARRDL, dan perlindungan keanekaragaman hayati dan pengurangan kemiskinan.

Rujukan

FAO. 2010. *Global Forest Resources Assessment* (Penilaian Sumberdaya Hutan Dunia). Roma: FAO.

The Global Partnership for Forest Landscape Restoration (Kemitraan Dunia untuk Rehabilitasi Kawasan Hutan). 2009.

Gregersen 1982, KFS, 2010. Gregersen, Hans. 1982. *Village Forestry Development in the Republic of Korea: A Case Study* (Pengembangan Hutan Desa di Korea Selatan: Studi Kasus). *Forestry for Local Community Development Programme* (Hutan untuk Program Pengembangan Masyarakat Setempat), Makalah GCP/INT/347/SWE. Roma: FAO PBB. hal. 104.

Informal Working Group on Interim Finance for REDD (Kelompok Kerja Informal mengenai Pembiayaan Sementara untuk REDD). 2009.

UNFCCC. 2010. Hasil kerja *Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action*/Kelompok Kerja Khusus mengenai Tindakan Kerjasama yang bertanggung jawab kepada Konvensi (Perjanjian Cancun untuk AWG-LCA). Dokumen yang dibagikan sebelum acara. Bonn, Jerman: *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja mengenai Perubahan Iklim PBB). http://unfccc.int/files/meetings/cop_16/application/pdf/cop16_lca.pdf

Bank Dunia. 2010. Indikator Pembangunan Dunia.

Zhang, Y. 2000. *Deforestation and Forest Transition: Theory and Evidence in China* (Deforestasi dan Perubahan Hutan: Teori dan Bukti di Cina). Dalam Palo dan Vanhanen (ed.) 2000.

Laporan ringkas telaah ini didasarkan pada makalah:

Gregersen, Hans, Hosny El-Lakany, Luke Bailey, dan Andy White. 2011. *Greener Side REDD+: Lessons for REDD+ from Countries where Forests Area is Increasing* (Sisi Lebih Hijau dari REDD+: Pelajaran bagi REDD+ dari Negara-negara yang Kawasan Hutannya Bertambah Luas). Washington, D.C.: Rights and Resources Initiative (Prakarsa Hak dan Sumberdaya).

Tersedia di www.rightsandresources.org

Rights and Resources Initiative (RRI) merupakan koalisi strategis yang terdiri dari lembaga-lembaga internasional, kawasan, dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan, penelitian, dan pelestarian untuk memajukan pembaruan tenurial hutan, kebijakan, dan pasar di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.rightsandresources.org.

Publikasi ini dibuat atas dukungan dari Ford Foundation, Kementerian Luar Negeri Finlandia, Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia, Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Swedia, Badan Pembangunan dan Kerjasama Swiss, dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris.